

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS AKIBAT  
PENYALAHGUNAAN KERAHASIAAN MINUTA AKTA OLEH  
PEKERJANYA**

**JURNAL**



**Disusun Oleh :  
MUHKAM ARIEF WIDODO, S.H.  
136010200111023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN KERAHASIAAN MINUTA AKTA OLEH PEKERJANYA**

**Muhkam Arief Widodo <sup>1</sup>, A.Rahmad Budiono <sup>2</sup>, Bambang Sugiri <sup>3</sup>.**

Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya  
Email: java\_ettawa@yahoo.com

## ***Abstract***

*Notary is one of the officials with authority in terms of making authentic act. Notary assisted by workers in carrying out their duties to prepare all of thing like drafting an act untill to save a completed act which was signed by the parties, the witnesses, and the notary as a original of the deed. Notary have to keep a secret about that, as it is written in the Law Number 2 of 2014 about changes of Law Number 30 of 2004 about Notary Office section 16 subsection 1 letter (f). A fact says that, there are many misappropriation about a confidentiality the original of the deed by workers. There are no specific rules about the workers obligation to keep secret about original of the deed, it would lead a vacuum of law. The main problem in this journal is, whether a civil notary justifiable due to misuse of confidential minutes of the deed by worker?. The main purpose of writing this journal is to analyze civil liability by notary for the misappropriation confidentiality the original of the deed by a worker. This journal used normative research method and used the statue approach and conceptual approaches. In this case, notary shall be responsible for third party losses, because in Burgerlijk Wetboek Article 1367 said people who lift others to represent their affairs, responsible for the losses caused by the waiter or subordinate them to do the work assigned that peoples.*

**Key words:** *civil liability, notary, confidentiality, original of the deed, worker*

## **Abstrak**

Notaris adalah salah satu jabatan dengan kewenangan dalam hal pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan jabatan tersebut, notaris dibantu oleh pekerjanya dalam hal membantu kebutuhan notaris dalam penyusunan sebuah akta otentik hingga penyimpanan akta yang telah ditandatangani para pihak, para saksi, dan notaris yang disebut dengan minuta akta. Minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh notaris, sesuai dengan kewajiban notaris dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 16 pasal 1 huruf (f). Fakta yang terjadi adalah kerahasiaan minuta akta tersebut masih banyak disalahgunakan oleh pekerja notaris dalam hal kerahasiaan yang wajib dijaga.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping, Dosen, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tidak adanya suatu pengaturan khusus bagi pekerja untuk ikut menjaga kerahasiaan sebuah minuta akta menjadi sebuah kekosongan hukum. Permasalahan utama dalam jurnal ini adalah apakah seorang notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjaannya?. Tujuan utama penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata notaris akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam permasalahan ini yang wajib bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga tersebut adalah notaris, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1367 menyatakan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

**Kata kunci:** tanggung jawab perdata, notaris, kerahasiaan, minuta akta, pekerja

## **Latar Belakang**

Suatu jabatan yang diberikan oleh negara kepada seseorang, memiliki sebuah tanggung jawab yang besar, karena dalam melaksanakan jabatan tersebut, negara akan memberikan sebuah aturan yang tentu saja akan dilengkapi dengan sanksi-sanksi tegas apabila aturan tersebut dilanggar. Tidak hanya dengan aturan, negara juga membentuk suatu instansi atau lembaga sebagai sarana pengawas bagi orang yang mengemban jabatan tersebut.

Notaris adalah salah satu jabatan yang diberikan oleh negara melalui Menteri Hukum dan HAM sebagai kepanjangan tangan dari negara. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Definisi tersebut sesuai dengan pasal 1868, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>4</sup> Dari penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa notaris merupakan salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik.

Tanggung jawab akan jabatan notaris ini bisa dibilang cukup besar, secara pidana, perdata, dan administrasi menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang notaris. Tetapi meskipun demikian jabatan notaris sangat banyak diminati pada saat ini. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya lulusan strata dua magister kenotariatan tiap tahun, yang dalam mengambil studi tersebut para mahasiswa

---

<sup>4</sup> Untuk selanjutnya disebut dengan KUH Perdata.

mempunyai tujuan untuk menjadi seorang notaris, dan fenomena menjamurnya notaris di kota besar merupakan suatu bukti bahwa jabatan notaris sangat diminati oleh banyak orang.

Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris mempunyai suatu aturan atau pedoman yang diberikan oleh negara, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dimana dalam undang-undang ini pemberlakuannya tidak menghapus undang-undang tentang jabatan notaris sebelumnya, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, melainkan hanya merubah dan menambahkan beberapa aturan yang dirasa perlu sesuai dengan perkembangan jaman, khususnya tentang jabatan notaris. Segala peraturan yang berkaitan dalam menjalankan jabatan notaris telah diatur dalam undang-undang ini, termasuk juga meliputi sanksi-sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris.

Perputaran roda ekonomi yang cepat menambah kebutuhan pelaku usaha untuk membuat suatu akta sebagai alat bukti atas suatu perjanjian yang dilakukannya atau menjadi sebuah alat pengaman atas suatu aset yang dipunyai. Tidak hanya pelaku usaha saja, orang per orang pun sangat membutuhkan suatu akta otentik sebagai pengaman atau alat bukti dalam melakukan suatu tindakan hukum. Semua orang membutuhkan sosok atau figur dimana keterangan, tandatangannya, serta segelnya dapat memberi suatu jaminan kepastian hukum dan memberi suatu alat bukti sempurna, serta suatu figur yang berada pada posisi netral, penasehat yang sangat handal atau tidak ada cacatnya, dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat dijadikan sebagai pengaman di kemudian hari bagi para pihak.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pembuat akta otentik, seorang notaris diharapkan mempunyai pengetahuan, kemampuan atau skill yang baik dalam bidangnya tersebut, sehingga akta yang disusun akan menjadi suatu akta yang baik dalam segi bahasa, susunan, maupun dari segi yuridis akta itu sendiri dapat diwujudkan dalam suatu akta, selain itu juga kejujuran, ketulusan, dan

---

<sup>5</sup> G.H.S Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 31.

mempunyai cara pandang objektif juga sangat diperlukan seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>6</sup>

Notaris adalah salah satu pejabat pembuat akta otentik, karena selain notaris, ada juga beberapa pejabat yang membuat akta otentik, misalnya adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yang membuat akta perkawinan, pejabat catatan sipil yang membuat akta kelahiran, dan sebagainya. Dalam pembuatan akta otentik misalnya akta pihak atau akta yang dibuat dihadapan notaris, seorang notaris harus menuangkan segala keinginan para penghadap, dan memberi solusi hukum serta pengertian hukum kepada para penghadap dalam pembuatan akta tersebut. Sehingga masyarakat menjadi tahu akan resiko hukum yang terjadi apabila akta tersebut dibuat, serta solusi hukum yang baik dari pembuatan akta tersebut. Itulah kenapa masyarakat mengharapkan seorang figur yang sangat diinginkan dalam hal pembuatan perjanjian ataupun hal lain yang ingin dituangkan dalam akta otentik.

Sebelum seorang notaris membuat suatu akta maka syarat utama yang harus diperhatikan adalah tentang syarat sah perjanjian, yang tertulis dalam KUH Perdata. Dalam KUH perdata tersebut menyebutkan bahwa:<sup>7</sup>

1. Adanya kesepakatan,
2. Cakap dalam bertindak hukum,
3. Adanya suatu hal,
4. Sebab yang halal.

Apabila syarat nomor 1 dan 2 di atas ternyata tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, dan apabila yang tidak terpenuhi adalah unsur nomor 3 dan 4 maka perjanjian yang dibuat akan batal demi hukum atau seolah perjanjian tersebut tidak ada. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi maka suatu perjanjian bisa dilakukan, dan isi perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga suatu akta mulai dibuat.

Suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang telah ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri, tidak berakhir sampai disitu khususnya bagi notaris tersebut. Salah satu hal yang wajib

---

<sup>6</sup> Komar Andasasmita, **Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya**, Sumur, Jakarta, 1981, hlm. 14.

<sup>7</sup> Lihat KUH Perdata, Pasal 1320.

dilakukan notaris adalah menjaga kerahasiaan atau merahasiakan isi akta tersebut, sesuai dengan kewajiban notaris yang terdapat pada sumpah dan janji jabatan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta dalam pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Habib Adjie memberikan pendapat mengenai sumpah jabatan notaris. Menurutnya sumpah jabatan tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam hal yang perlu dipahami, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Notaris akan bertanggung jawab kepada Tuhan, karena dalam sumpah tersebut memakai sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing
- 2) Notaris akan bertanggung jawab kepada Negara, karena negara akan memberi kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan fungsi jabatannya sebagai tugas negara, serta bertanggung jawab kepada masyarakat maksudnya adalah kepercayaan masyarakat akan jabatan notaris dalam hal pembuatan akta otentik dan kepercayaan masyarakat akan kerahasiaan akta otentiknya yang dibuat oleh atau dihadapan seorang notaris.

Kepercayaan yang diberikan seseorang dalam hal pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh atau dihadapan notaris tergolong cukup besar. Seseorang dengan sepenuh hati mempercayakan keotentikan akta tersebut dan rela mengeluarkan sejumlah uang yang terkadang dapat terbilang cukup besar untuk pembuatan suatu akta.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris dibantu oleh beberapa orang pekerja. Pekerja disini mempunyai tugas membantu notaris secara umum, seperti menyiapkan segala keperluan dalam pembuatan suatu akta, dan segala keperluan dalam hal penyimpanan minuta akta, ataupun secara khusus, yaitu sekaligus menjadi saksi atas suatu perjanjian yang dibuat dihadapan notaris di tempat dimana dia bekerja.

Dengan demikian pekerja disini mempunyai akses yang luas terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris dimana tempatnya bekerja, karena

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, **Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48.

pekerja inilah yang terkadang mencetak akta melalui mesin printer setelah menyusun bagian-bagian akta melalui media komputer. Belum lagi apabila minuta akta ini dijahit atau disimpan, para pekerja inilah biasanya yang melakukan hal tersebut.

Publikasi atas fotokopi fisik minuta akta adalah hal yang nyata, hal tersebut dapat dilihat dari fotokopi suatu minuta akta yang tersebar ke publik. Entah dengan tujuan apa, akta tersebut dapat dibaca oleh orang-orang yang bukan merupakan pihak atau ahli waris dari pihak dalam perjanjian tersebut, karena pada hakikatnya suatu perjanjian itu adalah suatu kerahasiaan, dimana yang berhak mengetahui isi dari perjanjian tersebut adalah para pihak yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain peraturan perundang-undangan.

Seharusnya minuta akta wajib dijaga kerahasiaannya oleh notaris. Bentuk fisik dari suatu minuta akta hanya ada di dalam protokol suatu kantor notaris, dan menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kerahasiaan isi minuta akta tersebut harus dijaga oleh notaris, sehingga tidak menjadi konsumsi publik. Untuk kepentingan dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim apabila merasa perlu adanya suatu minuta akta yang akan dijadikan suatu alat bukti, pengambilan fotokopiannya pun tidak sembarangan, atau harus melewati berbagai macam prosedur, salah satunya adalah permohonan ijin kepada Majelis Kehormatan Notaris.<sup>9</sup> Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, dimana banyaknya penyalahgunaan kerahasiaan isi minuta akta dalam bentuk publikasi fotokopi minuta akta tersebut, sehingga sangat terkesan bahwa kerahasiaan isi suatu minuta akta sangat tidak penting.

Dari kenyataan yang telah disebutkan di atas, seolah kerahasiaan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, khususnya minuta akta tersebut sangat tidak terjamin. Dan tentu saja akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Pasal 66 ayat 1 huruf (a).

Sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran yang terjadi dalam hal tidak dapat menyimpan kerahasiaan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris telah dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 11 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa beberapa sanksi yang dapat diterapkan pada notaris adalah peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi dari jabatan yang dilaksanakannya. Namun dalam ilmu hukum juga dikenal adanya pertanggungjawaban perdata, dimana dalam pertanggungjawaban perdata hal yang paling mendasar adalah timbulnya kerugian yang diderita pihak lain dan karena itu pihak yang menyebabkan kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, dimana sanksi yang biasa timbul dari pertanggungjawaban perdata adalah ganti rugi berupa materi atau pengembalian dalam keadaan semula, misalanya adalah pengembalian nama baik.

Sesuai dengan uraian di atas, maka pertanggungjawaban yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang membuat suatu akta kepada notaris ini dapat digolongkan ke dalam pertanggungjawaban perdata. Seorang notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan yang disebabkan oleh penyalahgunaan kerahasiaan oleh pekerjaannya tentu saja juga turut dirugikan oleh pekerjaannya tersebut. Tetapi apakah seorang notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dari pihak ketiga atau pihak yang telah membuat akta kepadanya apabila minuta aktanya tidak dijaga dengan baik, khususnya dalam hal kerahasiaan isi dari minuta akta yang disalahgunakan oleh pekerjaannya tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensi kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta khususnya minuta akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Apakah notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjaannya?



Tujuan Penulisan tesis ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis urgensi daripada kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta khususnya minuta akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta pertanggungjawaban notaris secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya.

Jurnal ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung dengan sumber hukum primer berupa peraturan yang berasal dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, sumber hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, artikel, tesis, serta media internet yang dianggap relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini, serta menggunakan bahan tersier (non hukum) yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan beberapa pekerja notaris di kota dan kabupaten malang.

## **Pembahasan**

### **A. Analisis Urgensi Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Khususnya Minuta Akta Sesuai dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum**

Apabila dilakukan analisis menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa, suatu perlindungan hukum adalah suatu perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar atau dirugikan orang lain, dimana tujuan perlindungan itu sendiri adalah untuk menjaga hak-hak warga negara yang telah diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Dari uraian pendapat atau teori tersebut, maka akan dapat dijumpai kalimat “perlindungan Hak Asasi Manusia”. Dengan adanya kalimat yang mengandung suatu kata-kata Hak Asasi Manusia, maka ada baiknya untuk merujuk kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 262.

Manusia, untuk mengetahui lebih jauh apa saja Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kerahasiaan suatu akta otentik khususnya sebuah minuta akta tersebut. Tetapi sebelum merujuk dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia tersebut, ada baiknya apabila kita merujuk pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai suatu norma yang menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Dalam perubahan ke dua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 tepatnya pasal 28 huruf (f) yang menjelaskan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan suatu informasi adalah setiap manusia berhak menyimpan suatu informasi. Setelah menemukan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia adalah menyimpan informasi, maka selanjutnya adalah merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adapun suatu pasal yang menyebutkan tentang hubungan dengan kerahasiaan akta pada penelitian ini yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada pasal 14 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.” Dalam pasal tersebut memuat kata “menyimpan”, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menyimpan berasal dari sebuah kata dasar simpan, dan menyimpan itu sendiri dapat diartikan sebagai memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan.<sup>11</sup>

Apabila dibaca dengan seksama bunyi dari pasal 14 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut

---

<sup>11</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia Online**, <http://kbbi.web.id/simpan>, 10 Mei 2015 pukul 11.10 WIB.

masih dapat dibilang adanya suatu pertentangan di dalamnya. Adanya kata mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seolah sejajar sehingga kita tidak tahu mana yang diutamakan. Apabila berkaitan dengan suatu informasi, maka ada baiknya kita merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu Hak Asasi Manusia, namun dalam tersebut juga mengecualikan beberapa informasi yang apabila dibuka di depan publik akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.<sup>12</sup> Ditambah lagi dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dimana dalam salah satu pasalnya juga menyatakan bahwa suatu akta otentik yang bersifat pribadi juga dilindungi dari publikasi.<sup>13</sup> Hal ini diatur tentu saja untuk melindungi kepentingan pribadi dari subjek yang membuat akta tersebut. Dengan demikian maka suatu keselarasan suatu peraturan telah terlaksana di Indonesia, khususnya mengenai suatu isi dari akta otentik yang tidak boleh dibuka di depan umum atau publik.

Suatu kerahasiaan yang bersifat hak-hak privasi yang dimiliki oleh setiap warga negara yang dilindungi oleh negara menjadikan suatu perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh warga negara tersebut. Sehingga kenyamanan dan rasa aman bagi warga negara yang melakukan perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dapat dirasakan bagi warga negara tersebut. Dalam hal ini, notarislah yang berkewajiban menyimpan atau menjaga kerahasiaan suatu informasi seseorang yang berupa minuta akta sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Apabila dianalisis dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dimana perlindungan hukum mempunyai dua macam atau jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, suatu kewajiban notaris

---

<sup>12</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang **Keterbukaan Informasi Publik**, Pasal 17 huruf g.

<sup>13</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang **Kearsipan**, Pasal 44 ayat 1 huruf g.

dalam merahasiakan isi dari suatu minuta akta adalah untuk menjaga hak-hak privasi dari seseorang yang menjadi penghadap maupun pihak dalam minuta akta tersebut maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Perlindungan hukum preventif, dimana sesuai dengan maksud atau tujuan perlindungan hukum preventif yang berfungsi sebagai pencegah dari suatu masalah yang akan timbul, maka dengan adanya suatu aturan mengenai kewajiban notaris dalam melindungi kerahasiaan isi dari suatu akta, khususnya minuta akta yang dituangkan dalam undang-undang jabatan notaris sebagai salah satu kewajiban notaris, dapat mencegah timbulnya suatu masalah. Dapat diambil contoh sebagai berikut, seseorang akan merasa tidak nyaman apabila suatu perjanjian kredit atau utang piutangnya akan menjadi konsumsi publik, terlebih lagi apabila debitur tersebut adalah suatu pemilik perusahaan besar yang selalu menjaga "*image*" (harga diri) dari pesaing-pesaing bisnisnya. Contoh lain adalah jika seseorang menuangkan keinginan terakhirnya dalam suatu akta wasiat, maka apabila telah adanya suatu peraturan bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan tersebut, hal tersebut akan menghindari suatu masalah yang akan timbul, diantaranya adalah akta tersebut akan benar-benar menjadi sebuah akta wasiat apabila dijaga kerahasiaannya sampai dengan waktu dimana akta tersebut akan dibuka dihadapan ahli waris, serta dapat menghindari adanya sengketa atau perselisihan dari calon ahli waris apabila mengetahui isi akta tersebut sebelum waktunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya suatu aturan tentang kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan sebuah akta, maka hal tersebut dapat mencegah suatu masalah yang mungkin akan terjadi. Sehingga aturan tentang kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan sebuah akta dapat menjadi suatu aturan mutlak bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan suatu akta, sehingga masalah-masalah yang mungkin terjadi dari tidak terjaganya suatu kerahasiaan suatu akta dapat dihindari.

b) Perlindungan Hukum Represif, dimana dengan adanya suatu kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta khususnya minuta akta, maka sesuai dengan tujuan hukum represif yang berguna apabila suatu permasalahan

terjadi, maka apabila suatu saat ada suatu kerugian yang diderita oleh seseorang akibat penyalahgunaan kerahasiaan suatu akta, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris dengan dasar aturan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan suatu akta akan menjadi dasar aturan yang dilanggar apabila kerahasiaan suatu akta tidak dijaga dengan baik. Pemerintah memberi sarana dalam memberikan suatu bentuk perlindungan represif, yaitu litigasi yang berarti melalui jalur pengadilan, serta jalur non-litigasi yang berarti tidak melalui jalur pengadilan, antara lain negosiasi yang dapat diartikan sebagai pertemuan langsung antara dua pihak yang berperkara guna melakukan atau mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi, mediasi yang dapat diartikan dengan hadirnya satu pihak yang bersifat netral (mediator) yang bertugas sebagai penengah dari suatu masalah yang sedang terjadi antara kedua belah pihak., dan konsiliasi yang diartikan dengan hadirnya satu pihak (konsiliator) yang bertugas sebagai penengah dari suatu masalah yang sedang terjadi antara kedua belah pihak dan apabila telah ditemukan kesepakatan atau jalan keluar dari permasalahan tersebut maka hasil dari kesepakatan atau jalan keluar dari masalah tersebut dituangkan dalam bentuk hitam diatas putih serta didaftarkan pada pengadilan negeri setempat .

Dengan adanya suatu kewajiban bahwa notaris wajib menjaga kerahasiaan isi suatu akta, khususnya minuta akta, maka perlindungan hukum bagi warga negara dalam hal hak privasi yang dapat disimpan oleh warga negara tersebut, dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka warga negara dapat merasakan aman dan nyaman dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang dituangkan melalui suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

#### **B. Analisis Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pekerjanya Berdasarkan Teori Tanggung Jawab**

Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan seseorang kepada pihak yang telah dirugikannya. O.P Simorangkir berpendapat bahwa, tanggung jawab yaitu kewajiban untuk menanggung atau bertanggung

jawab segala-galannya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk, maka tanggung jawab ialah bertanggung jawab atas akibat tindakan buruk yang dilakukannya.<sup>14</sup> Tanggung jawab yang dilakukan notaris terhadap suatu akta yang dibuatnya antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Notaris diharuskan untuk melakukan pembuatan akta yang baik dan benar, maksudnya akta yang dibuat itu memenuhi unsur ataupun kehendak hukum dan keinginan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b) Notaris diharuskan membuat akta yang berkualitas tinggi maksudnya akta yang dibuatnya harus sesuai dengan faedah faedah atau aturan hukum yang diinginkan para pihak dalam arti yang sebenarnya, tidak ada rekayasa dalam pembuatan akta tersebut.
- c) Berdampak positif maksudnya bagi siapapun yang akan mengakui akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sah dan sempurna.

Selain tanggung jawab tersebut, kewajiban-kewajiban notaris yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi atau dilakukan seorang notaris dalam suatu pembuatan akta yang dimulai dari awal pembuatan hingga setelah pembuatan akta.

Dalam KUH Perdata menjelaskan beberapa tanggung jawab antara lain:<sup>16</sup>

- a) Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan (adanya unsur kesengajaan dan kelalaian), pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa dampak kerugian pada orang lain, mengharuskan orang yang membuat kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut,
- b) Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, pasal 1366 KUH Perdata menjelaskan, bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang hati-hatinya,

---

<sup>14</sup> O.P Simorangkir, **Etika Jabatan**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 102.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, **Etika Profesi Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 93-94.

<sup>16</sup> Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

c) Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan, bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi diminta pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya. Pasal 1367 KUH perdata menyebutkan bahwa:

*“seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.*

*Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”*

Roscoe Pound berpendapat bahwa suatu tanggung jawab mempunyai tiga macam jenis, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja,
- b) Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja,

---

<sup>17</sup> Roscoe Pound, *Op.cit.*, hlm. 92.

c) Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.

Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe Pound menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu:

a) Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat,

b) Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas :

i. Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja "*dolus*" maupun yang tidak disengaja "*culpa*",

ii. Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan),

iii. Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.

Pada prinsipnya suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang saja, tetapi juga melanggar kesusilaan, kepatutan atau melanggar hak orang lain yang dapat merugikan. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dibagi sebagai berikut, antara lain:

1) Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain, hak disini ialah hak subjektif "*subjectief recht*", yaitu pada dasarnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada individu untuk melindungi kepentingan dirinya. Hak subjektif yang mendasar antara lain, hak pribadi, seperti hak kebebasan hak atas kehormatan, hak atas nama baik dan sebagainya,

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum ialah pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang,

3) Adanya pertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan dalam artian, norma atau tatanan yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesusilaan sesuai dengan waktu dan tempat tertentu, apa yang dianggap patut pada saat



ini, ditempat lain mungkin dapat berbeda atau menjadi suatu perbuatan yang tidak patut untuk masa yang akan datang atau ditempat yang berbeda,

4) Adanya benturan atau pertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan melawan hukum harus mempunyai beberapa unsur sebagaimana berikut :

- a) Adanya suatu perbuatan melawan hukum,
- b) Adanya suatu unsur kesalahan,
- c) Adanya suatu kerugian yang diderita,
- d) Adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalan dan kerugian.

Dari unsur-unsur tersebut harus dapat terpenuhi, ketika seseorang akan meminta pertanggungjawaban perdata dari seseorang.

Dalam permasalahan ini, saat terjadi penyalahgunaan kerahasiaan suatu minuta akta maka pihak akan merasa dirugikan baik secara materiil maupun non materiil. Menurut penulis kerugian materiil disini dapat diartikan sebagai biaya atau ongkos dalam pembuatan akta tersebut, dengan maksud adalah dimana seseorang yang telah membayar honorarium seorang notaris dalam pembuatan akta otentik dan mempercayakan sepenuhnya akta itu terhadap notaris termasuk dalam hal kerahasiaannya dan ternyata kerahasiaan itu tidak dapat dijaga maka akan timbul kerugian masalah biaya tersebut. Dalam hal ini biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan adalah kerugian materiil paling dasar yang ditanggung oleh pihak tersebut. Sedangkan kerugian non materiil adalah kerugian yang berkaitan dengan batin seseorang, dalam hal ini tentu saja rasa tidak nyaman, ketakutan, dan sebagainya akan dialami oleh pihak tersebut, dapat diambil contoh apabila terjadi penyalahgunaan akta perjanjian kredit, maka si debitur dapat merasakan rasa malu, apabila itu akta wasiat maka yang akan dialami adalah rasa tidak tenang, takut akan adanya sengketa, dan sebagainya, karena akta wasiat tentu saja akan dibacakan setelah penghadap yang membuat pernyataan tersebut telah meninggal. Dan apabila dibuka sebelum meninggalnya pewasiat yang terjadi bahwa akta tersebut bukan lagi menjadi suatu akta wasiat, karena telah dibuka sebelum waktunya.

Apabila diuraikan menurut unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Adanya perbuatan melawan hukum: dalam penyalahgunaan kerahasiaan suatu minuta akta oleh pekerja notaris, maka tentu saja ada suatu perbuatan melawan hukum, dari sisi notaris telah terjadi pelanggaran berupa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum notaris, dimana kewajiban hukumnya adalah menjaga kerahasiaan isi dari suatu akta, khususnya minuta akta yang hanya terdapat dalam protokol di kantor notaris tersebut. Sedangkan bagi pekerja notaris yang dimaksud dari adanya suatu perbuatan melawan hukum adalah dimana pekerja telah melanggar hak orang lain yang telah dilindungi kepentingannya oleh undang-undang.
- b) Adanya kesalahan: kesalahan disini telah dilakukan oleh pekerja, tetapi kesalahan bagi notaris adalah adanya kesalahan tidak langsung, dimana terjadi kelalaian atau kurang hati-hati dalam menyimpan atau menjaga kerahasiaan suatu minuta akta.
- c) Adanya kerugian yang diderita: kerugian utama yang diderita bagi pihak yang bersangkutan adalah kerugian non materiil yang berkaitan dengan batin, serta kerugian materiil yaitu ongkos yang telah dikeluarkan sebagai pembuatan suatu akta, karena dengan mengeluarkan ongkos tersebut, maka pihak tersebut mempunyai harapan bahwa hak-hak yang ada pada dirinya dalam pembentukan akta akan dijamin dan dijaga. Dengan kata lain saat pihak telah mengeluarkan biaya yang juga termasuk untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas informasi yang telah dibuatnya, maka akan merasa dirugikan jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh notaris.
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian: jelas disini ada hubungan antara kesalahan dan kerugian. Dengan adanya penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerja notaris, maka kerugian akan diderita oleh pihak yang bersangkutan.

Apabila dilakukan analisis menurut teori tanggung jawab oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa, “suatu pertanggungjawaban dapat dibebankan bukan hanya berdasarkan tindakan saja, tetapi juga dapat berdasarkan kesalahan.” Dan menurut salah satu sumber dari tanggung jawab yang dikemukakan oleh

Roscoe Pound bahwa salah satunya adalah perbuatan melawan hukum yang akan membebankan tanggung jawab tersebut kepada seseorang yang oleh hukum wajib sebagai penanggungjawabnya.” Dalam undang-undang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi imbalan berupa upah atau lainnya kepada tenaga kerja yang dipekerjakannya. Dari sini jelas bahwa notaris merupakan orang perseorangan yang memberi imbalan berupa upah kepada pekerjanya, sehingga notaris dapat diartikan sebagai pemberi kerja atau atasan. Sehingga hubungan notaris dan pekerja adalah hubungan kerja. Apabila beranjak dari pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang oleh hukum wajib menanggungnya, maka dalam suatu hubungan kerja, KUH Perdata mempunyai pasal khusus tentang tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum, tepatnya dalam pasal 1367 KUH Perdata, yang dalam salah satu kalimatnya menjelaskan bahwa majikan bertanggung jawab atas kesalahan dari orang-orang yang diangkat untuk mewakili urusan kerjanya terhadap pihak lain. Kata majikan dalam KUH Perdata ini dapat diinterpretasikan secara gramatikal sebagai pemberi kerja, karena dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kata majikan sudah tidak dijumpai lagi.

Hal tersebut juga dipertegas dalam salah satu bentuk dari pertanggungjawaban perdata yaitu tanggung jawab mutlak, dimana suatu tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang belum tentu secara langsung melakukan suatu kesalahan yang merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini notaris memang tidak melakukan kesalahan secara langsung, tetapi karena dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris lah yang mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan isi suatu akta serta dalam hubungan kerja notaris bertindak sebagai pemberi kerja atau majikan, maka notaris akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga, khususnya dalam hal perdata.

Berdasarkan kamus hukum yang membagi bentuk tanggung jawab yaitu *responsibility* dan *liability*, bentuk tanggung jawab notaris dalam hal ini termasuk dalam bagian *liability*. Dimana dalam *liability* yang juga dikenal dengan istilah

tanggung gugat mempunyai pengertian praktis yaitu menunjuk pada suatu pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kekeliruan atau kesalahan yang diperbuat oleh subyek hukum. Maksud dari kekeliruan atau kesalahan yang diperbuat subjek hukum disini adalah kesalahan yang dilakukan notaris dengan tidak mampu menjaga kerahasiaan suatu akta yang dimana undang-undang telah mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan dari suatu akta.

Apabila dilihat dari pertanggungjawaban pejabat dalam melaksanakan jabatannya, pendapat Kranenburg dan Vegtig menyebutkan ada dua landasan dalam pertanggungjawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya, adalah:

- a. Teori *Fautes Personalis*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri jika karena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga, dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes De Service*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab terhadap kerugian bagi pihak ketiga akan dibebankan kepada instansi dimana pejabat tersebut melaksanakan jabatannya. Dalam penerapan pembebanan tanggung jawab dalam teori ini akan sesuai dengan besar kecilnya suatu kesalahan yang dilakukan pejabat tersebut.

Kedua perbedaan yang mendasar dalam pertanggungjawaban jabatan diatas adalah, dimana dalam teori *Fautes Personalies* telah terjadi suatu kesalahan pribadi dalam menjalankan jabatannya sebagai bagian dari pemerintah tetapi bukan berkaitan dengan pelayanan publik, dengan kata lain kesalahan tersebut bersumber dari seseorang yang berfungsi sebagai pejabat negara dalam hal kurang hati-hati atau kelalaiannya. Sedangkan dalam teori *Fautes De Service* dapat dibebankan karena adanya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pertanggungjawaban perdata notaris akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta yang dilakukan oleh pekerja notaris, apabila ditinjau dari pendapat Kranenburg dan Vegtig, maka dapat digolongkan dalam Teori *Fautes Personalis*, dimana notaris sebagai pejabat negara atau bagian dari pemerintah karena kurang

hati-hati atau kelalaiannya menyebabkan tidak terjaganya kerahasiaan suatu minuta akta yang disebabkan oleh penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta tersebut oleh pekerjanya.

Kedua bentuk teori pertanggungjawaban pejabat tersebut memang lebih condong ke arah tanggung jawab administrasi pejabat tersebut, dimana sanksi-sanksi yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah sanksi-sanksi administrasi. Dalam kaitannya dengan notaris, maka sanksi-sanksi tersebut antara lain pemberhentian sementara, pemberhentian tidak hormat, dan lain sebagainya.

### **Simpulan**

1. Urgensi daripada kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta, khususnya minuta akta adalah untuk melindungi hak privasi seseorang yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam hal menyimpan informasi pribadinya. Hal ini dapat dijumpai dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000 pasal 28 huruf (f), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat 1, dan hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (g), serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf (g).
2. Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung, karena dalam salah satu prinsip pertanggungjawaban perdata terdapat suatu prinsip tanggung jawab mutlak, dimana seseorang yang berbuat kesalahan secara tidak langsung (akibat kelalaian atau kurang hati-hati) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita seseorang. Selain adanya prinsip tersebut, dalam suatu hubungan kerja antara notaris dan pekerja, notaris adalah pemberi kerja dari pekerja, pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa majikan (dapat juga disebut pemberi kerja) ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh buruh (pekerja), dimana kesalahan tersebut menyebabkan pihak lain menderita kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, **Etika Profesi Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 1980, **Peraturan Jabatan Notaris**, Erlangga, Jakarta .
- Habib Adjie, 2009, **Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia**, Mandar Maju, Bandung.
- Komar Andasasmita, 2011, **Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya**, Sumur, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.P Simorangkir, 1998, **Etika Jabatan**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Roscoe Pound, 1996, **Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of law)** diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bharatara Niaga Media, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang **Ketenagakerjaan**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang **Keterbukaan Informasi Publik**.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang **Kearsipan**.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### Naskah Internet

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online** dalam <http://kbbi.web.id/simpan>.